



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Kasus Pada SKPD Provinsi D.I Yogyakarta)

Teguh Erawati, SE.,M.Sc.,Ak.,CA.,ACPA ^{1*}
Nurul Hidayati²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
*email: eradimensiarch@gmail.com

ABSTRACT

Government Accounting Standards are Accounting Principles established in preparing and presenting Government Financial Statements. Government Accounting Standards are regulated in Government Regulation No. 71 of 2010. Regional Government Financial Reports are a description of the performance of Local Governments in one Accounting period. The purpose of this study was to determine whether the SKPD financial statements of the Special Province of Yogyakarta are in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, examining the effect of applying government accounting standards on the quality of financial statements. The nature of research in this study using quantitative. The sample in this research are employees in the Accounting Section or Finance Section. The test used is the validity and reliability test, and the sampling technique uses purposive sampling. The data source used is Primary Data, and the data collection method used is a Questionnaire with a Skala Likert

INFO ARTIKEL

Diterima: 2021-04-15
Direview: 2021-09-02
Disetujui: 2021-11-23
Terbit: 2021-12-21

Keyword:

Kompetensi Aparatur;
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah; Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah

PENDAHULUAN

Menurut sejarah perkembangan akuntansi dari abad 11 sampai abad 20, akuntansi sebagai proses pembukuan dan pemrosesan data keuangan pada sebuah perusahaan. Akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara perusahaan dengan konsumen produk. Namun dalam akuntansi pemerintahan daerah, cenderung kepada pemrosesan data keuangan pada satu lingkup Biro atau Instansi. Perubahan pada bidang akuntansi merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara. Wujud perubahan bidang akuntansi berupa peralihan dari akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual, yang diamanatkan dalam Undang-undang tentang keuangan negara. Pada Pasal 36 UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat 2 UU

Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilakukan paling lambat tahun 2008. Menurut (Danang, 2014) adanya perubahan menjadi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Di Indonesia sendiri, fenomena akuntansi dimulai sejak gerakan reformasi pada tahun 1998 dan ditetapkannya UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adanya proses implementasi tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala, terutama berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia pada bidang akuntansi yang terampil dan peraturan tingkat pusat yang tidak selaras dengan peraturan di daerah (McLeod dan Harun, 2014).

Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari awal analisis transaksi dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Adapun tujuan laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dan pemakai informasi dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, ataupun politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Pernyataan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 berkaitan dengan Penyajian Laporan Keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik untuk anggaran, antar periode, ataupun antar entitas. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas untuk giliran selanjutnya agar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai secara efektif.

Teori StewardShip

Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengasumsikan adanya hubungan yang kuat, kepuasan, dan kesuksesan organisasi (Yoyo *et.al*, 2017: 60)

Teori Agency

Jansen dan Meckling (1976) dalam (Sardi dkk, 2016 dalam Gita Intan 2019) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*parcipal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan principal. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan. Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh masyarakat sebagai principal.

Kajian Pustaka

Menurut (Lubis, 2014) Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur kinerja berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Aruan, 2003) dalam (Inapty, 2016). Sedangkan menurut Nurilla (2014) Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut (Hanaffi, 2017), menyatakan kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Kompetensi aparatur pemerintah daerah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi aparatur yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan nilai informasi dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. (Purwita, 2013) dalam (Irma, 2018) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memerlukan pemahaman yang baik dari setiap aparat yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Menurut (Mahsun, Sulistyowati & Purwanugraha, 2011 dalam Ari 2019) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan semua fungsi usaha (keuangan, sumber daya manusia, dll). Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi, atau transaksi lainnya. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik harus dapat menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan baik sumber maupun penggunaannya melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Hubungan Kompetensi Aparatur Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Hanaffi (2017), menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Kompetensi aparat pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparat berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya

Pada penelitian Karyogis dan Putra (2017) dalam Danang (2018) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan teori dan pengembangan hipotesa diatas, maka penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H1: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Hubungan Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting*) digunakan untuk mencatat *revenue* ketika diperoleh (*earned*) dan biaya pada saat terjadi (*incurred*). Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut penelitian Kiranayanti (2016), dan Husen (2017) dalam Sri Ayem (2019) menyatakan bahwa penerapan basis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Sri Ayem, 2019). Brendhi Septo Nugroho (2018) menyatakan bahwa Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Agustini (2016) dan Hasibuan (2018) menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunannya.

Hubungan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial. Karakteristik kualitatif laporan keuangan, terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (PP No 71 tahun 2010). Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan semua fungsi usaha (keuangan, sumber daya manusia, dll). Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan (Mahsun, Sulistyowati & Purwanugraha, 2011:115 dalam Ari, 2019).

Berdasarkan penelitian M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Paneawati Martiningsih (2016) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian dari Ruswanto Ngguna, Muliati, dan Fadli Moh. Saleh (2017) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

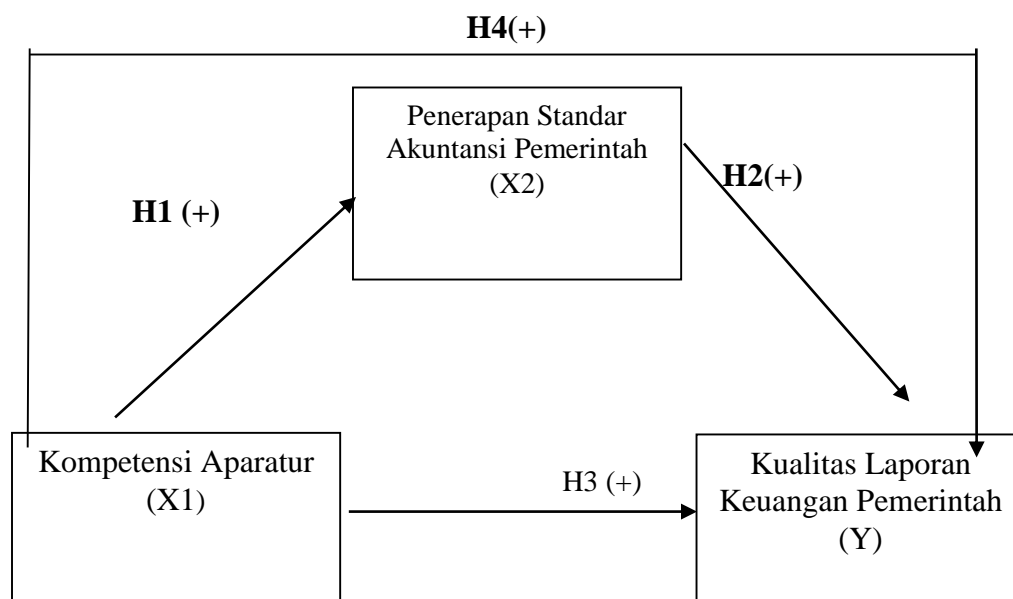
H3: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hubungan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Penerapan Standar Akuntansi Sebagai Variabel Intervening

Brendhi Septo Nugroho (2018) menyatakan bahwa Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Agustini (2016) dan Hasibuan (2018) menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hipotesa diatas, maka penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4= Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel intervening.

Kerangka Pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya BPPKA, BAPPEDA, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Disperindag, Dispora, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pertanian. Teknik dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan data kuantitatif menggunakan kuesioner *skala likert 5 poin*.

Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator Operasional Variabel Dependen (Y)

Kualitas Laporan Keuangan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai	a. Dapat dipahami b. Relevan c. Keandalan d. Dapat dibandingkan

Variabel Intervening

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Indikator Operasional Variabel Intervening (X2)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	Menurut Usman (2002, dalam Lidya 2017) menyatakan bahwa penerapan adalah suatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan serta adanya mekanisme dari suatu sistem, dan penerapan standar akuntansi pemerintah memerlukan pemahaman yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 8 penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah standar akuntansi yang mengakui pendapatan, dll	Kesiapan SDM, Peran SAP berbasis akrual, dan Faktor pendukung berbasis akrual

Variabel Independen

Kompetensi Aparatur

Indikator Operasional Variabel Independen (X1)

Kompetensi Aparatur

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kompetensi Aparatur	Menurut Aruan (2003) dalam Inapty (2016), Kompetensi aparatur pemerintah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya	a. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) b. Keterampilan (<i>skill</i>) c. Sikap (<i>Attitude</i>)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 1 variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur, 1 variabel intervening yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan 1 variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian statistic dengan menggunakan program SPSS versi 21 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur	80	40	67	55.76	5.720
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	80	24	44	34.70	3.595
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80	50	78	64.25	5.808
Valid N (listwise)	80				

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kejelasan Kompetensi Aparatur memiliki rata-rata sebesar 55.76 dengan *Std. Deviation* 5.720. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki rata-rata

34.70 dengan *Std. Deviation* 3.595. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki rata-rata 64.25 dengan *Std. Deviation* 5.808

Hasil Uji Validitas

Untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden maka digunakan rumus korelasi Produk Moment yaitu menurut (Sugiyono, 2005). Teknik korelasinya memakai *Pearson Correlation*, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 21. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki r hitung $>$ r tabel (Ghozali, 2001). Hasil Uji Validitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R-hitung	R-tabel	Keterangan
Pengaruh Kompetensi Aparatur	Item 1	0,529	0,220	Valid
	Item 2	0,580	0,220	Valid
	Item 3	0,508	0,220	Valid
	Item 4	0,326	0,220	Valid
	Item 5	0,262	0,220	Valid
	Item 6	0,446	0,220	Valid
	Item 7	0,529	0,220	Valid
	Item 8	0,513	0,220	Valid
	Item 9	0,364	0,220	Valid
	Item 10	0,284	0,220	Valid
	Item 11	0,225	0,220	Valid
	Item 12	0,515	0,220	Valid
	Item 13	0,276	0,220	Valid
	Item 14	0,548	0,220	Valid
	Item 15	0,627	0,220	Valid
	Item 16	0,342	0,220	Valid
	Item 17	0,656	0,220	Valid
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Item 1	0,545	0,220	Valid
	Item 2	0,377	0,220	Valid
	Item 3	0,280	0,220	Valid
	Item 4	0,603	0,220	Valid
	Item 5	0,381	0,220	Valid
	Item 6	0,317	0,220	Valid
	Item 7	0,305	0,220	Valid
	Item 8	0,497	0,220	Valid
	Item 9	0,472	0,220	Valid
	Item 10	0,467	0,220	Valid
	Item 11	0,507	0,220	Valid
	Item 12	0,440	0,220	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Item 1	0,661	0,220	Valid
	Item 2	0,713	0,220	Valid
	Item 3	0,688	0,220	Valid
	Item 4	0,635	0,220	Valid
	Item 5	0,715	0,220	Valid
	Item 6	0,656	0,220	Valid
	Item 7	0,759	0,220	Valid
	Item 8	0,731	0,220	Valid
	Item 9	0,663	0,220	Valid
	Item 10	0,390	0,220	Valid
	Item 11	0,703	0,220	Valid
	Item 12	0,724	0,220	Valid
	Item 13	0,704	0,220	Valid
	Item 14	0,456	0,220	Valid
	Item 15	0,319	0,220	Valid
	Item 16	0,707	0,220	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan besarnya nilai signifikansi seluruh butir pertanyaan memiliki nilai *r*-hitung lebih dari 0,220. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir dinyatakan valid dan kuisioner dalam penelitian ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya yaitu regresi linier berganda.

Uji Reliabilitas

Teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam penelitian ini dengan teknik Cronbach's alpha (Ghozali, 2001). Apabila nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih besar dari 0,6, maka kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan *reliabel*. Jika nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih kecil 0,6, maka kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak *reliabel*. Hasil pengujian reliabilitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Crobach	Nilai kritis	Keterangan
Pengaruh Kompetensi Aparatur	0,727	0.6	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,604	0.6	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,872	0.6	Reliabel

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* seluruh variabel penelitian lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Ghozali (2001), maka semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal.

Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolineritas.

Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Uji Normalitas

Unstandar_residual	Batas	Keterangan
0,472	0,05	Normal

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui nilai *asympt.sig* sebesar $0,472 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolineritas maka dilihat dari nilai *Variances Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* (α).

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengaruh Kompetensi Aparatur	0.827	1.209	Tidak terjadi multikolineritas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.827	1.209	Tidak terjadi multikolineritas

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolineritas

Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	batas	Keterangan
Pengaruh Kompetensi Aparatur	0,101	0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,899	0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

Analisis Hipotesis

Analisis Regresi Model 1

Dalam penelitian ini, dalam menganalisis regresi linear berganda penulis menggunakan seri program statistik SPSS. Tabel berikut ini:

Tabel 7 Analisis Regresi Model 1

Variabel	B	Beta	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	20.130				
Kompetensi Aparatur	0.261	0.416	4.037	0.000	Signifikan
F hitung	16,300				
Sig F	0,000				
R square	0,173				
Variabel Dependent		: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah			

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 7 diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 20.130 + 0.261X$$

1. Konstanta = 20.130
Artinya jika tidak ada variabel Kompetensi Aparatur yang mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, maka Penerapan sebesar 20.130 satuan.
2. $b = 0.261$
Artinya jika variabel Kompetensi Aparatur meningkat sebesar satu satuan maka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan meningkat sebesar 0.261 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

Analisis Regresi Model 2

Dalam penelitian ini, dalam menganalisis regresi linear berganda penulis menggunakan seri program statistik SPSS. SPSS adalah suatu program *software* komputer yang digunakan untuk mengolah data baik parametrik maupun nonparametrik, seperti ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 8 Analisis Regresi Model 2

Variabel	B	Beta	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	24.776				
Kompetensi Aparatur	0.246	0.242	2.419	0.018	Signifikan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.743	0.460	4.593	0.000	Signifikan
F hitung	21,874				
Sig F	0,000				
R square	0,362				
Variabel Dependent		: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 8 diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 24.776 + 0.246 X_1 + 0.743 X_2$$

1. Konstanta = 24.776

Artinya jika tidak ada variabel Kompetensi Aparatur dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka Penerapan sebesar 24.776 satuan.

2. $b_1 = 0.246$

Artinya jika variabel Kompetensi Aparatur meningkat sebesar satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meningkat sebesar 0.246 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

3. $b_2 = 0.743$

Artinya jika variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah meningkat sebesar satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meningkat sebesar 0.743 dengan anggapan variable bebas lain tetap

Teknik Analisis Data

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.000 ($0.000 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Kompetensi Aparatur secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.018 ($0.018 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Kompetensi Aparatur secara parsial terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah”.

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.000 ($0.000 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f)

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.010 ($0.010 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Koefisien Determinasi (r^2 square)

Berdasarkan analisis regresi linear berganda menunjukkan besarnya koefisien determinasi (r^2 square) = 0,362, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 36,2% sisanya

sebesar 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Mediasi

Pengujian peran mediasi variabel intervening dari variabel dependen terhadap variabel independen dilakukan dengan perhitungan analisis path. Hasil perhitungan analisis path pengaruh Kompetensi Aparatur (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang dimediasi oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Z) menunjukkan tidak langsung dan pengaruh total. Berikut perhitungan pengaruh tidak langsung dan pengaruh total.

Tabel 9

Direct Effect, Indirect Effect dan Total Effect Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimediasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Direct Effect	
X → Y	
(p ₁)	= 0,242
Indirect Effect	
X → Z → Y	
(p ₂ x p ₃)= 0,416 x 0,460	= 0,19136
Total Effect	
(Direct Effect + Indirect Effect = 0,242 + 0,19136 = 0,43336)	

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.000 (**0.000 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Kompetensi Aparatur secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Riza (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua sebagai Variabel Intervening.

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.010 (**0.010 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN

1. Kompetensi Aparatur secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (M. Ali Fikri dkk, 2016) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menurut penelitian (Ruswanto Ngguna dkk, 2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sri Ayem, 2019) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun hasil pada

penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti dan Agustina, 2016) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua sebagai variabel intervening. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Brendhi Sapto Nugroho, 2018) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

REFERENSI

- Firdaus, D., Sayogo, D. S., & Latifah, S. R. I. W. (2010). *Evaluasi Penerapan Pp No 71 / 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua : Studi Kasus di Pemda Nganjuk*. (71).
- Gita, I. P. (2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Pemanfaatan E-SBN Ritel Online Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*.
- Husain, V., Rasuli, L. O., & Pakaya, L. (2015). *MONGONDOW SELATAN*. 1–15.
- Inapty, M. A. F. B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2016). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. 9(April), 27–42. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583>
- Kusumah, A. A. (n.d.). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Lasoma, V. A. (n.d.). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*.
- Latifah, A. (2015). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah*.
- Ngguna, R. (2010). *INFORMASI KEUANGAN DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU*. (71), 34–42.
- Pavitasari, E. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal*.
- Pilander, S. M., Paul, D., Saerang, E., & Gamaliel, H. (n.d.). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Sistem Pengendalian Intern , Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu Pendahuluan Salah satu bentuk pertanggung*. 128–139.
- Pontoh, A. J., Nangor, G. B., & Lambey, R. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Kualitas Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Penyajian Dana Dekonstrasi dalam Laporan Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara*. 12(2), 1167–1178.
- Putri, A. M., Kirmizi, & Basri, Y. M. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Pemediasi*. *Ekonomi*, 24, 16–31.
- Rafid, R. Z. (2018). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi* (Vol. 2002). <https://doi.org/10.1109/CICED.2018.8592188>
- Raharjo, K., Si, M., & Andini, R. (2016). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang*. 2(2).
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA TANGERANG SELATAN* Astika Rahmawati*, I Wayan Mustika, & Lilik Handaya Eka. 20(2005),

8–17.

- Rochimawati, D., & Asim, M. (2017). *2017 PENYUSUNAN LKPD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 71 TAHUN 2010*. 204–229.
- Yuliana, L. (2016). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerinah, Pengalaman Kerja dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Pujanira, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY (Vol. 7).
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.01.013>